

Rohani Inta Dewi¹

Partisipasi Perempuan Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Artikel Penelitian

Abstrak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini melihat partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan Desa di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok barat. hasil penelitian yang dilakukan di lima desa di Kecamatan Batulayar menunjukkan partisipasi perempuan penyandang disabilitas masih minim. Karena kurang tersedianya akses dan informasi yang diperoleh. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Para perempuan penyandang disabilitas. Selain itu, Masih minimnya kompetensi sumber daya manusia sehingga perlu diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi supaya bisa menyampaikan kebutuhannya. Perempuan penyandang disabilitas berharap mereka bisa dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa supaya apa yang menjadi aspirasinya bisa direalisasikan dalam bentuk kebijakan.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Perempuan Penyandang Disabilitas dan Perencanaan Pembangunan

¹Universitas Nahdlatul Wathan
Mataram
rohaniintadewi09@gmail.com

PENDAHULUAN

Perempuan di Indonesia secara langsung telah memberikan kontribusi pada ekonomi nasional dan rumah tangga melalui kerja produktif dan reproduktif, namun mereka masih belum terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga, masyarakat, dan nasional. Keterbatasan perwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik telah menyebabkan kebijakan ekonomi dan social mengutamakan laki-laki, bersamaan dengan investasi sumber daya yang juga menguntungkan mereka.

Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah di Lombok masih minim. Lombok timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara memiliki representasi masing-masing 4%, 15,6%, 8%, 6,7%. Fakta saat ini baru 4-15% perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Karena perempuan tidak hadir dampaknya adalah masalah perempuan seperti kehamilan beresiko tinggi, kesehatan reproduksi, stunting, ketersediaan air bersih yang terjangkau bagi perempuan dan masalah lainnya yang lekat dengan perempuan kurang mendapat

Ini adalah artikel *Open Access* berdasarkan ketentuan *Creative Common Attribution License*, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan produksi ulang dalam media apapun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.

© 2021 Penulis. Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik) diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

perhatian. Sehingga beban perempuan terus bertambah. Dampak lainnya juga adalah anggaran desa tidak termasuk untuk isu prioritas yang berdampak pada perempuan dan anak perempuan. Anggaran desa belum sepenuhnya responsif gender. Masih ditemukan kesenjangan gender dalam berbagai hal.

Gambaran kesenjangan gender di Lombok Barat yakni Penduduk Lombok Barat (2019) 675,2 ribu jiwa: Laki-laki 330,2 ribu jiwa (48,9%), Perempuan 345 ribu jiwa (51,1%). Keluhan Kesehatan: laki-laki 22,51%, perempuan 27,04%. Angka kesakitan: Laki-laki 13,78%, perempuan 16,02%. Melek huruf: Laki-laki 89,22%, perempuan 81,05%. Penduduk usia 7-24 tahun yang bersekolah; Laki-laki 72,16%, perempuan 68,5%. Mengapa fokus pada partisipasi karena: Pertama, perempuan membentuk mayoritas yang signifikan yang minim partisipasinya di Indonesia. Kedua, budaya sasak-lombok masih kuat patriarkal. Ketiga, perempuan merupakan kelompok demografis yang paling minim partisipasinya dalam proses demokrasi. Meskipun sistem pemilihan Indonesia memiliki kuota gender yang disebutkan dalam beberapa undang-undang yang juga disebut sebagai *affirmative action*.

Mengapa perempuan disabilitas. Karena Merujuk UU Desa nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan untuk melibatkan perempuan dalam setiap proses perencanaan pembangunan di desa. Namun, partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam rangkaian tahapan perencanaan pembangunan desa masih sangat terbatas, baik dari sisi jumlah keterwakilan, maupun kualitas partisipasinya. Keterbatasan jumlah perempuan yang berpartisipasi pada akhirnya membatasi keanekaragaman serta kekayaan ide, gagasan serta aspirasi perempuan termasuk perempuan disabilitas.

Berdasarkan data dari KPU terkait daftar pemilih tetap pilkada 2018 di kabupaten Lombok Barat. Jumlah penyandang disabilitas se kabupaten Lombok Barat berjumlah 980 orang, dengan kategori; Tuna Daksa sebanyak 270 orang, Tuna Netra sebanyak 195 orang, Tuna Rungu/Wicara sebanyak 220 orang, Tuna Grahita sebanyak 124 orang, dan disabilitas lainnya sebanyak 171 orang. Untuk di tingkat

kecamatan Batu Layar sebanyak 33 orang dengan kategori; Tuna Daksa sebanyak 3 orang, Tuna Netra sebanyak 7 orang, Tuna Rungu/Wicara sebanyak 10 orang, Tuna Grahita sebanyak 3 orang, dan disabilitas lainnya sebanyak 10 orang.

Perwakilan perempuan yang umumnya terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa berasal dari unsur PKK dan kader Posyandu. Dua lembaga desa tersebut dianggap sebagai representasi perempuan di desa. Kondisi ini berakibat pada program aspirasi perempuan terbatas. Padahal kebutuhan perempuan termasuk perempuan penyandang disabilitas terkait dengan banyak hal termasuk layanan-layanan lain yang sejalan dengan pemenuhan hak-haknya sebagai masyarakat desa yang setara.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melihat tingkat partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa di kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat.

PARTISIPASI

Siagian berpendapat bahwa partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan ada juga partisipasi yang bersifat pasif. Partisipasi yang bersifat pasif berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya, masih menurut Siagian, partisipasi aktif berwujud sebagai berikut:

“ Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasinya. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan nasib kepada orang lain, seperti kepada pimpinan, kelompok masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal; memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban lainnya; ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh

pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting”.

Berdasarkan definisi-definisi yang dinyatakan diatas maka paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini (*good governance*) salah satunya mencantumkan prinsip partisipasi yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi merencanakan, mensukseskan, dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah (daerah). Dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut, berarti masyarakat sudah turut aktif memikirkan pemenuhan kebutuhan hidup dan penghidupannya demi masa depan yang lebih baik.

Sumardi mengatakan bahwa “Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut Juliantara partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan. Menurut Sherry R Arnstein membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 (delapan) tingkat partisipasi masyarakat yang sangat terkenal di mana berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

1. *Citizen control*, masyarakat dapat partisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan

dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.

2. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah;
3. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.
4. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.
5. *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan publik hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.
6. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari

masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.

7. *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
8. *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial di lingkungan /daerah/wilayah dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan. Pembangunan seharusnya penanganan suatu masalah secara menyeluruh dan holistik merupakan pandangan perencanaan pembangunan menurut Russek Ackoff dalam hasil kajian sistem perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Widodo Perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. *Conyer* dan *Hill* mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pendapat lain tentang definisi perencanaan yang dikemukakan Handoko perencanaan adalah pemilihan

sekumpulan kegiatan dan keputusan apa yang dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Perencanaan dilakukan untuk melaksanakan dan mencapai suatu pembangunan baik skala besar suatu negara maupun skala kecil yaitu daerah atau wilayah. Perencanaan pembangunan dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat bisa melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing suatu wilayah atau daerah. Hal tersebut juga dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ingin menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, peneliti berupaya mengungkapkan bagaimana partisipasi perempuan penyandang disabilitas di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Sumber data dalam penelitian ini adalah perempuan penyandang disabilitas, Pemerintah desa, UU Desa Tahun 2014 dan UU tentang disabilitas tahun 2016. Fokus penelitian ini "partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa". Proses pengumpulan data dalam penelitian ini; *Pertama* mendatangi kantor desa menjelaskan maksud dan tujuan untuk penelitian tentang partisipasi perempuan disabilitas sekaligus sebagai informan untuk melihat bagaimana perspektif pemerintah desa terkait partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa. Kedua mendatangi rumah-rumah penyandang disabilitas yang menjadi target informan yang ingin kita wawancarai. Ketiga teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan Dokumen. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan laporan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang terdiri dari reduksi atau pengurangan data, penyajian data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Rangkaian analisis tersebut dilakukan terus menerus (berulang-ulang) selama penelitian ini berlangsung.

HASIL PENELITIAN

Partisipasi perempuan penyandang disabilitas

Dari lima perempuan penyandang disabilitas di lima desa (Desa Batulayar, Senteluk, Pusuk Lestari, Sandik, Lembah Sari) di kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB yang peneliti wawancarai menghasilkan bahwa para Perempuan penyandang disabilitas sangat ingin dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Musyawarah Dusun (MUSDUS) Musyawarah desa (MUSDES) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES). Supaya mereka bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah desa. Agar apa yang menjadi kebutuhannya bisa diusulkan, diakomodir, dan masuk kedalam daftar usulan prioritas. Selain itu juga mereka ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat lainnya. Hal ini disampaikan oleh ibu Marhamah, perempuan disabilitas daksa dari desa Pusuk Lestari bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pedagang. Ia menuturkan bahwa dirinya selalu bersemangat jika diundang mengikuti kegiatan. Dirinya kerap hadir di beberapa kegiatan tapi kalau untuk kegiatan perencanaan pembangunan desa dirinya tidak pernah diundang.

Kalau kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan pelatihan sering ikut dan sering dilibatkan oleh PKK. Tapi kalau Musdus dan lainnya tidak pernah ikut. Mereka tidak pernah datang karena tidak pernah diundang, sehingga mereka tidak mengetahui ada proses musyawarah untuk menyampaikan usulan. Kalau diundang, ibu Marhamah bilang dirinya pasti akan datang. Biar bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya sebagai perempuan penyandang disabilitas.

Ia juga menyampaikan bahwa kepala dusun hanya mau mengajak yang gesit *"kalau kayak saya yang gak bisa jalan cepat ini mana mau diajak. Selain itu mungkin tidak diajak karena saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi dianggap tidak bisa mewakili. Malu jadinya untuk minta diundang. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa diajak dan diundang."*

Masalah utamanya, mereka tidak mendapatkan akses informasi dan tidak mendapatkan undangan dalam setiap pertemuan yang diadakan. Baik dilaksanakan oleh Dusun maupun Desa.

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan ibu Madiyah, disabilitas Rungu dari Desa Batulayar dan ibu Susilawati disabilitas Netra dari desa Senteluk. Ketiga informan yang peneliti wawancara tersebut memiliki spirit yang tinggi untuk ikut terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di desanya, namun tidak ada undangan yang pernah mereka dapatkan.

Menurut mereka Pemdes tidak menyediakan akses untuk perempuan penyandang disabilitas biar bisa terlibat dan datang di musdus, musdes dan lainnya. Harapannya untuk kedepan pemdes mengundang mereka agar memiliki pengalaman dan tahu apa yang orang bahas. Juga bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya pada proses perencanaan pembangunan di desa mereka.

Dari kelima informan, satu diantaranya menyampaikan secara akses mereka diberikan ruang oleh pemdes, namun tidak memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Hal ini disampaikan oleh ibu Siti Aminah, penyandang disabilitas daksa dari desa Lembah Sari.

Secara Sumber Daya Manusia terkait perencanaan pembangunan desa mereka masih lemah. Dari lima perempuan penyandang disabilitas yang peneliti wawancarai, empat diantaranya sama sekali tidak memahami tentang salah satu proses pembangunan yaitu perencanaan pembangunan. Mereka tidak tahu apa itu Musdus, Musdes dan Musrembangdes. Mereka tidak memahami apa yang akan dibahas dalam mekanisme itu.

Kemudian masalah akses informasi, Sumber Daya Manusia, dan minimnya *trust* (kepercayaan) dari masyarakat secara umum kepada para penyandang disabilitas. Menjadi alasan utama minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Diantara lima informan penyandang disabilitas yang diwawancarai peneliti, hanya satu orang yang menjawab diundang dan bersuara di depan umum, yakni ibu Muradah disabilitas Daksa dari desa Sandik. Dia mengatakan disetiap musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa, selalu diundang. Selalu dilibatkan. Dia selalu hadir. Pemerintah desa juga sudah menyediakan akses. Sudah ada

akses untuk perempuan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan seperti Musdus, Musdes, hingga Musrenbangdes selalu diundang dan hadir. Selama ini dia merasa tidak memiliki hambatan untuk hadir. Ia menyampaikan semoga terus seperti ini bahwa perempuan penyandang disabilitas seperti dirinya selalu dilibatkan. Pada saat hadir Musdus hingga Musrenbangdes selalu mengusulkan dan alhamdulillah didengar oleh pemerintah desa. Seperti saat itu dia mengusulkan pemberdayaan ekonomi. Hasilnya tahun 2018 sudah di respon untuk pelatihan usaha bagi perempuan disabilitas, dan penyandang disabilitas sudah mendapatkan bantuan.

Dari lima informan di lima desa di Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat yang peneliti wawancara, hanya ada satu orang yang diberikan akses dan informasi untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Usulannya juga diakomodir atau dimasukkan dalam RKPDES, RPJMDES dan APBDES. Sisanya empat orang itu masih minim diberikan akses dan informasi oleh pemerintah desa. Mereka juga berharap diberikan kesempatan dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para perempuan penyandang disabilitas serta adanya pendampingan intens yang diberikan kepada mereka.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menyampaikan perempuan penyandang disabilitas belum berpartisipasi. Juga memaparkan intinya ada di kepala dusun, mereka punya wewenang untuk memilih siapa saja yang hadir di Musdus, termasuk untuk juga mengajak ibu-ibu disabilitas. Kepala desa sudah minta mereka (penyandang disabilitas) dibuatkan kelompok. Mempermudah melakukan pengecekan *skill*. Sehingga menurut pemdes mereka bisa intervensi membantu sesuai skillnya. Misalnya dulu pak kades minta kades buat kelompok ibu-ibu untuk nanti dikasih bantuan mesin cuci jadi bisa buka usaha laundry. Semua masyarakat bisa ngelaundry ke perempuan disabilitas.

Tapi kadesnya tidak percaya. Dia bilang kalau nanti ibu-ibu penyandang disabilitas bisa nyuci dengan benar, sama menyetrika dengan benar. Nanti rusak baju orang dia setrika. Dia bilang

kalau sudah jadi kelompok kita kasih bantuan, nanti juga kita sertai dengan pelatihan. Tapi tetap dia tidak yakin. Sampai saat ini jadinya belum ada bentuk intervensi kami pemdes. Sudah sering minta biar semua bisa terakomodir.

Sebenarnya tidak hanya perempuan disabilitas saja yang didorong, laki-lakinya juga pak kades minta kadesnya untuk di buat kelompok, misalnya ada warga laki-laki yang jadi pemulung minta kadesnya untuk diidentifikasi skillnya. seperti yang lain kayak semir sepatu atau jahit sepatu, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke gunungsari (kecamatan yang berbeda) hanya untuk jahit sepatu dan perbengkelan. Pemerintah desa siap memberikan bantuan modal kepada mereka. Dia mengatakan Itulah cara kita saling membantu. Soalnya walaupun kita mau bantu tapi tidak sesuai kapasitasnya kan juga susah. Dia sudah sering meminta para kepala dusun untuk melakukan identifikasi warganya yang disabilitas laki-laki dan perempuan, terus dibuatkan kelompok serta diidentifikasi skillnya. Waktu Musdus kalau bisa galilah apa yang menjadi kebutuhannya. Masyarakat harus percaya sama dia. Jadi orangnya nggak perlu keliling lagi. Tapi masyarakat belum percaya sama saudara-saudara kita yang disabilitas ini.

Solusinya seperti itu kami pemdes akan membantu sesuai kapasitas dan skillnya. Tapi kan sebelum itu harus diidentifikasi skillnya. Biar mudah ya jadikan kelompok dulu. Nah, jadi kan ketemu kami dari pemdes akan bantu sesuai kebutuhan mereka. Disitu kadang kami susah untuk ngomong. Paling tidak kadesnya lah yang peka dengan persoalan itu. Tapi masalahnya saat ini masyarakat belum memiliki kepercayaan sepenuhnya terhadap laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas. Karena mereka dilihat secara fisik jadi dianggap belum bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Padahal kan tidak selalu begitu.

Pemerintah desa membuka diri untuk melibatkan perempuan penyandang disabilitas, bahkan dia siap memberikan pelatihan-pelatihan dan memberikan modal usaha sesuai dengan skill nya. Namun masalahnya kepala dusun yang dimintai melakukan pendataan belum berjalan dengan baik.

Begitupun yang dialami oleh beberapa desa lainnya. Mereka menyampaikan keterlibatan perempuan penyandang disabilitas masih sangat minim. Menurut pemerintah desa motivasinya yang belum ada untuk perempuan disabilitas. Di pemdes sendiri sebenarnya sudah mengusulkan pemberdayaan ekonomi untuk perempuan penyandang disabilitas pada perencanaan pembangunan.

Mungkin agar mereka bisa lebih aktif lagi dibutuhkan pendampingan agar mereka lebih percaya diri untuk hadir dan terlibat pada proses perencanaan pembangunan seperti Musdes dan lainnya. Juga perlu adanya motivasi agar perempuan penyandang disabilitas lebih percaya diri untuk hadir dan bisa mengusulkan kebutuhan mereka.

Belum pernah terlibat. Kami belum pernah melibatkan perempuan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Kami pemdes juga belum menyediakan akses untuk teman-teman penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan juga dialami oleh teman-teman ini seperti tidak bisa datang karena kondisi tidak bisa jalan. Di desa Batulayar ini juga jumlah penyandang disabilitas tidak banyak. Untuk perkumpulan perempuan ada namanya kaukus perempuan disitu semua kelompok perempuan berkumpul didampingi dan dilatih agar berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa seperti di Musdes, Musdes, hingga Musrenbangdes. Tapi di kaukus perempuan anggotanya belum ada dari teman-teman penyandang disabilitas.

Sepertinya kedepannya penting untuk diadakan pelatihan khusus untuk perempuan disabilitas seperti kaukus perempuan. Dan juga bagi kami di pemdes penting memiliki data perempuan penyandang disabilitas sehingga mempermudah untuk melibatkan mereka dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Juga adanya pelatihan atau motivasi agar mereka bisa bersuara atau mengungkapkan pendapat dengan percaya diri.

Tidak ada partisipasi. Tidak ada yang datang. Padahal sudah tersedia akses tapi penyandang disabilitas tidak ada yang datang. Sepertinya mereka kurang percaya diri. Selain itu juga mohon maaf fisik yang tidak bisa jalan juga jadi hambatan untuk hadir ke kantor desa mengikuti

musyawarah. Hal-hal yang bisa dilakukan agar mereka hadir ya adanya pelatihan khusus (extra) untuk disabilitas. Kami di pemerintah desa sebenarnya sudah memberikan bantuan berupa pemberdayaan ekonomi untuk perempuan disabilitas. Ke Depan agar mereka terlibat dalam perencanaan pembangunan desa penting adanya pembinaan untuk mereka agar kepercayaan dirinya tumbuh untuk datang ikut musyawarah.

Salah satu pemerintah desa yang kami wawancarai mengatakan, Perempuan disabilitas selalu terlibat dalam musyawarah baik itu musyawarah dusun, dan musyawarah desa. Kami di pemdes sudah menyediakan akses untuk perempuan disabilitas. Aksesnya sudah tersedia. Selama ini kami mengundang perempuan disabilitas baik dari musdes sampai musrenbang. Saya selalu menyampaikan bahwa dari musyawarah tingkat dusun harus melibatkan perempuan disabilitas. Kalau saya melihat mereka tidak memiliki hambatan untuk hadir. Mereka semangat untuk datang. Intinya yang penting kita sudah kasih mereka akses.

Kami di pemdes selalu bilang perempuan penyandang disabilitas harus selalu diundang dalam musyawarah. Agar kita juga mendengar dan tahu apa saja kebutuhan mereka. Kami dari pemdes juga sudah memberikan bantuan untuk penyandang disabilitas berupa pemberdayaan ekonomi. Kedepannya juga penting untuk pelatihan dan usaha bagi mereka agar lebih mandiri dan punya pemasukan.

Lima pemerintah desa yang kami wawancarai, hanya ada satu desa yang sudah melibatkan perempuan disabilitas. Tidak hanya memberikan akses dan informasi. Namun apa yang diusulkannya diakomodir. Seperti memberikan modal usaha dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan skillnya. Supaya mampu bersaing dengan yang lainnya.

PEMBAHASAN

Partisipasi perempuan penyandang disabilitas masih minim, mereka belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk dilibatkan dalam kegiatan Desa. Mereka dianggap tidak bisa mengikuti agenda-agenda dengan cepat. Padahal mereka ingin memberikan kontribusi.

kalau kita melihat apa yang dikonsepskan oleh siagian mengemukakan, setiap orang memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. tidak terhalangi oleh batasan fisik semata. Masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada mereka terlebih dahulu melakukan sesuatu, Karena banyak juga perempuan penyandang disabilitas di tempat lain memiliki skill dan keterampilan bagus.

Cara mereka memberikan partisipasi dalam tingkat desa dengan mereka dilibatkan dalam acara MUSDUS, MUSDES dan MUSREMBANGDES. Selain itu juga bisa dilibatkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga desa. Bile perlu juga mereka diberikan kesempatan menjadi pengurus dalam lembaga tersebut. Supaya mereka memiliki pengalaman berorganisasi. Disamping itu juga perempuan penyandang disabilitas perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Agar waktu dilibatkan atau diundang mereka berani bersuara menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya.

Karena memang, Membangun desa memerlukan keterlibat sebanyak-banyak orang. pemerintah tidak bisa sendirian dalam bekerja, perlu ada keterlibatan swasta dan masyarakat termasuk didalamnya para perempuan penyandang disabilitas. Apalagi dengan segala keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Perlu ada gotong royong secara bersama-sama, supaya terjadi percepatan pembangunan.

Apalagi saat ini kita memasuki era kolaborasi saling bahu-membahu antara manusia yang satu dengan lainnya. Keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan apabila ada keterlibatan banyak orang. mereka secara bersama-sama mau merumuskan desa nya. Sehingga kebijakan yang akan diambil nantinya sesuai dengan kebutuhan bersama dan dampaknya akan dinikmati secara bersama-sama.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat partisipasi perempuan penyandang disabilitas masih minim. Karena mereka jarang diberikan akses dan informasi dari pihak

pemerintah. Kedua, mereka ingin diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan penyandang disabilitas. Selain itu, Harapan mereka ingin untuk kedepan pemdes mengundang mereka dalam setiap proses perencanaan pembangunan desa, biar memiliki pengalaman dan tahu apa yang sedang dibahas, diusulkan, dan dijadikan sebagai usulan prioritas untuk kemudian dianggarakan oleh pemdes.

REFERENSI

- Ackoff, Russell, 2017. *Learning and education Management Academy*. Managemen Academy.
- Arnstein, Sherry R, 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Planning Association
- Conyers, Diana and Peter Hills 1990. Pengantar Perencanaan Pembangunan di Dunia Ketiga. John wiley & Sons Chichester. New York
- Handoko, 1996. Kepemimpinan Transformasional dan Pemberdayaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 11 No.1 Tahun 1996
- Moleong 2004. *Metode penelitian kualitatif*, edisi revisi. PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- _____. 2010. *Metode penelitian kualitatif*. Edisi revisi, PT. Remaja Rosdakarya offset, bandung.
- Sumardi, Nyoman I, 2010. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi Pemberdayaan
- Sunarti, 2003. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.
- Widodo, 2006. Perencanaan pembangunan: Aplikasi Komputer (era otonomi daerah). UPP STIM YKPN

Perundang-undangan

BPS Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

Data dari KPU kabupaten Lombok Barat terkait daftar pemilih tetap pilkada 2018

Data yang dikumpulkan oleh Oxfam pada tahun 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang: Pemerintahan Desa*